

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi keuangan daerah. Proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terselenggara, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. mengingat pentingnya dukungan sistem informasi keuangan daerah ini, maka diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Terkait dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa daerah dalam menyampaikan informasi keuangan daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, kecermatan, ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat memenuhi prinsip tersebut, pemerintah daerah menggunakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini dikenal dengan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau aplikasi SIPKD.

Keberhasilan penggunaan sistem informasi dapat dilihat dari kepuasan pemakai. Menurut Jogiyanto (2007), dimasa sekarang ini walaupun kualitas sistem informasi sudah membaik, tetapi masih ada saja terjadi kegagalan dalam penerapannya. Lamb *et.al.*, (2004) berargumen bahwa salah satu aktor terpenting dalam sistem informasi adalah pengguna (*user*).

Penelitian mengenai keberhasilan penggunaan suatu sistem informasi sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian mengenai keberhasilan penggunaan aplikasi SIPKD masih sedikit dilakukan. Beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan SIPKD adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kegunaan persepsian.

Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Hasil penelitian Istianingsih dan Setyo Hari Wijanto (2008) membuktikan bahwa kualitas sistem mempengaruhi kepuasan pengguna. Tarigan (2011) menunjukkan adanya hubungan positif diantara kepuasan pengguna dan kualitas *e-learning system*.

Kualitas informasi merupakan karakteristik yang melekat pada informasi, sehingga informasi bermakna bagi pemakai dan memberi keyakinan kepada pemakai dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian Istianingsih dan Setyo Hari Wijanto (2008) menunjukkan bahwa kualitas informasi mempengaruhi

kepuasan pengguna. Rimawati dan Setyo Hari Wijanto (2010) menunjukkan bahwa kualitas informasi *e-Government* berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna.

Salah satu pemerintah daerah yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Penggunaan aplikasi SIPKD ini diharapkan dapat menciptakan efektivitas kerja serta meningkatkan dalam mengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DPPKAD, terdapat beberapa permasalahan masih dirasakan oleh para pengguna SIPKD. Perubahan cara kerja dari sistem manual menjadi sistem yang berbasis pada teknologi informasi membuat para petugas tidak mudah melakukan koreksi jika terjadi kesalahan. Keluhan terhadap layanan/fitur SIPKD dirasakan membatasi dan merepotkan pengguna SIPKD. Lamanya penanganan permasalahan yang timbul dari sistem merupakan permasalahan lain yang dihadapi pengguna SIPKD. Permasalahan dengan *output*/hasil SIPKD dirasakan masih ada yang kurang untuk mendukung bentuk pelaporan kegiatan di luar anggaran, sehingga masih dilakukan penyesuaian secara manual. Dari semua keluhan akibat permasalahan yang muncul, diduga disebabkan oleh penerapan SIPKD yang kurang sesuai dengan harapan penggunanya.

Walaupun aplikasi SIPKD masih belum sempurna, Pemerintah Kabupaten Bangka tetap mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah

daerah yang tepat waktu dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Hal ini terbukti dengan diperolehnya dana insentif daerah (DID) setiap tahunnya. Keberhasilan dari Kabupaten Bangka ini dapat menjadi contoh khususnya bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bangka Belitung dan kabupaten/kota di provinsi lainnya di Indonesia. Penelitian ini berusaha menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna SIPKD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik memberi judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kegunaan Persepsian terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintahan Kabupaten Bangka”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sistem berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pengguna SIPKD?
2. Apakah kualitas informasi secara positif berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPKD?
3. Apakah kegunaan persepsian berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pengguna SIPKD?

### **1.3. Batasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kegunaan persepsian terhadap kepuasan pengguna SIPKD.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah kualitas sistem berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pengguna SIPKD.
2. Untuk menganalisis apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPKD.
3. Untuk menganalisis apakah kegunaan persepsian berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPKD.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan Sistem Informasi Akuntansi khususnya yang terkait dengan pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kegunaan persepsian serta kepuasan pengguna SIPKD.

## **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah daerah menyangkut kepuasan pengguna SIPKD, terutama mengenai kualitas sistem, kualitas informasi, dan kegunaan persepsian.

## **3. Kontribusi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakannya mengenai penggunaan SIPKD khususnya untuk kebutuhan pelaporan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

### **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan persepsian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Mendeskripsikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Mendeskripsikan tentang sampel penelitian, analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis statistik yang sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

